

**STUDI KOMPARATIF SISTEM HUKUM KEBENDAAN ATAS
KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH ANTARA INDONESIA
DAN PERANCIS**

Ratu Bilkis¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

INTISARI

Tumpang tindih sertifikat tanah di Indonesia mencerminkan ketidaklarasan antara hukum adat dan hukum modern, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Penelitian ini membandingkan sistem hukum kebendaan Indonesia dan Perancis, khususnya dalam pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Jenis data hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perancis menerapkan sistem pendaftaran tanah yang bersifat konstitutif dan formalistik, menjadikan akta otentik serta pencatatan sebagai syarat sah kepemilikan. Sebaliknya, Indonesia masih mengakui penguasaan fisik sebagai dasar pengajuan hak, yang menimbulkan celah konflik agraria. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam menyoroti kekosongan pengaturan mengenai penguasaan tanah dalam hukum Indonesia, serta menawarkan model pembaruan hukum dengan merujuk pada struktur sistem pertanahan di Perancis yang lebih terorganisir dan formalistik.

Kata Kunci: *Penguasaan Tanah, Asas Sosial, Pendekatan Konstitutif, Asas Absolut*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

A COMPARATIVE STUDY OF PROPERTY LAW SYSTEMS ON LAND OWNERSHIP AND POSSESSION BETWEEN INDONESIA AND FRANCE

Ratu Bilkis¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRACT

The overlap of land certificates in Indonesia reflects a lack of synchronization between customary law and modern law, resulting in legal uncertainty and agrarian conflicts. This study compares the property law systems of Indonesia and France, particularly in the regulation of land ownership and possession. The research employs a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The types of legal data used in this study include primary and secondary legal materials. The findings show that France applies a constitutive and formalistic land registration system, where authentic deeds and official recording are prerequisites for valid ownership. In contrast, Indonesia still recognizes physical possession as the basis for applying for land rights, creating loopholes for agrarian conflict. This study contributes both conceptually and normatively by highlighting the regulatory gap regarding land possession in Indonesian law and proposing a legal reform model by referring to the more structured and formalistic French land administration system.

Keywords: *Land Possession, Social Function Principle, Constitutive Registration, Absolute Principle.*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.